
**Dampak Investasi Swasta dan Publik terhadap
Pengurangan kemiskinan (Studi Kasus: Provinsi Penghasil Nikel di Indonesia)**

DANIEL ANANTA TALMERA

email: daniel.atalmera@atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Abstract.

The aim of this study is concluding whether the realization of public investment and private investment has reduced the number of poverties in Nickel Producing Provinces in Indonesia. By using 4 cross-province data from 2013 to 2022. This paper examines the relationship between the foreign direct investment realization, domestic direct investment realization, public investment and the number of poverty. By using Regression Analysis we found that domestic direct investment has significant effect on poverty reduction. Meanwhile foreign direct investment Realization and public investment realisation has no significant effect on poverty reduction in South Sulawesi, Central Sulawesi, Southeast Sulawesi and North Maluku.

Keywords: *Poverty, foreign direct investment, domestic direct investment, public investment.*

PENDAHULUAN

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara dikenal sebagai daerah pertambangan nikel di Indonesia. Kegiatan penambangan nikel semakin masif sejak nikel digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan mengenai pembatasan ekspor nikel yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Pembatasan ekspor tersebut dalam rangka mendorong pengembangan kapasitas pengolahan hilir yang akan memberikan nilai tambah pada nikel, dan artinya nikel akan memberikan manfaat bagi nikel. tidak boleh diekspor dalam bentuk bijih mentah. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi yang masuk ke daerah penghasil nikel, tidak hanya penanaman modal dalam negeri tetapi juga penanaman modal asing. Kegiatan penambangan nikel memang telah mendatangkan penanaman modal baru baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Investasi Menurut Boediono (1981) adalah jumlah pengeluaran sektor swasta untuk pembelian barang dan jasa guna menambah stok

yang digunakan atau untuk perluasan produksi yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur besarnya peran sektor swasta dalam perekonomian. Menurut Salim (2012) Penanaman Modal Asing (PMA) adalah suatu kegiatan mendatangkan modal atau penanaman modal, dengan tujuan melakukan kegiatan usaha dengan komposisi lengkap modal asing atau bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal asing harus didasarkan pada substansi, prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga Penanaman Modal Asing harus berstatus Badan Hukum di Indonesia.

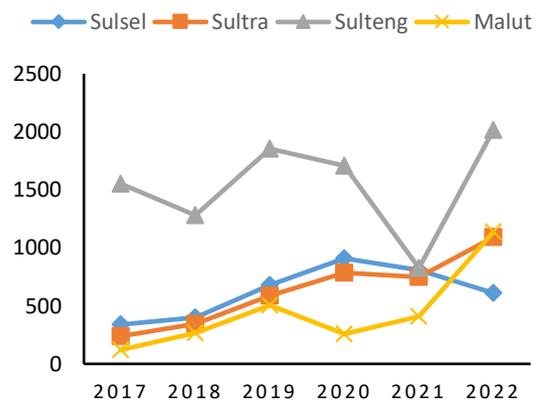
Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, unsur-unsur dalam Penanaman Modal Asing (PMA) meliputi alat pembayaran Asing yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia dan dibiayai oleh pemerintah digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan Indonesia. Alat-alat bagi perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam

wilayah Indonesia, sepanjang alat-alat tersebut bukan berasal dari kekayaan devisa Indonesia. Sebagian hasil perusahaan berdasarkan undang-undang ini diperkirakan akan dialihkan, namun digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan di Indonesia.

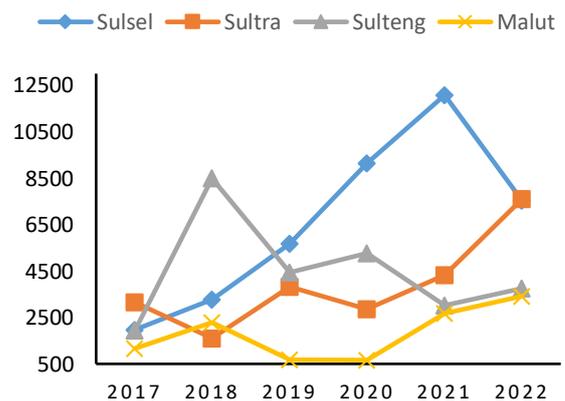
Penanaman modal asing meliputi penanaman modal pada aktiva produksi riil yang berupa pabrik, berbagai macam barang modal, tanah, peralatan persediaan luar negeri, dan sebagainya. Pengadaan modal asing biasanya disertai dengan pelaksanaan fungsi manajemen, dan investor sendiri yang mempertahankan kendali atas dana yang telah mereka investasikan (Salvatore dan Krugman, 2006).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha, yaitu badan hukum, bukan badan hukum, atau perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia baik PMA maupun PMDN berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal meliputi: (1) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, (2) Menciptakan lapangan kerja, (3) Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (4) Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional. (5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. (6) Mendorong perkembangan perekonomian kerakyatan. (6) Mengolah potensi perekonomian menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 1
Realisasi Penanaman Modal Asing
2017-2022
Di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara
(Dalam Jutaan Dolar AS)



Grafik 2
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri
2017-2022
Di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara
(Dalam Miliar Rupiah)



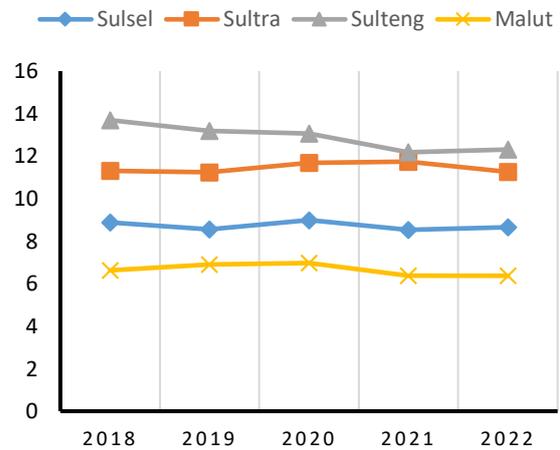
Source: Badan Pusat Statistik, 2023

Dari grafik 1 dan grafik 2 baik realisasi Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri terus mengalami peningkatan di keempat provinsi tersebut, peningkatan terus menerus terjadi di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Pada tahun 2017 realisasi investasi langsung asing di Sulawesi tenggara adalah 238 juta dolar AS, dan realisasi

investasi langsung domestik adalah 3,148 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2022 realisasi investasi langsung asing menjadi 1,090,7 juta dolar AS, sementara realisasi domestik domestik Investasi sebesar 7,596 Miliar Rupiah. Selain itu, di Maluku Utara pada tahun 2017 realisasi Penanaman Modal Asing sebesar 121,7 juta Dollar Amerika, dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 1.150 Miliar Rupiah, kemudian pada tahun 2022 realisasi Penanaman Modal Asing menjadi sebesar 1.136,5 juta Dollar Amerika, sedangkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 3,414 Miliar Rupiah. Peningkatan investasi tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan meningkat dari 4,16% pada tahun 2021, menjadi 5,42% pada tahun 2022. Sulawesi Tengah meningkat dari 11,7% pada tahun 2021, menjadi 15,47% pada tahun 2022. Sulawesi Tenggara juga mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 4,1% pada tahun 2021 menjadi 5,53% pada tahun 2022. Dan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara juga meningkat dari 16,79% pada tahun 2021, menjadi 22,94% pada tahun 2022.

Meskipun investasi dan pertumbuhan ekonomi tinggi di daerah-daerah tersebut, kondisi masyarakat di sana tidak banyak berubah. Persentase penduduk miskin tidak mengalami penurunan yang signifikan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara masih di atas 10% dalam lima tahun terakhir. Persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 sebesar 11,32%, dan menjadi 11,27% pada tahun 2022, serta persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 sebesar 13,69% dan hanya menurun menjadi 12,3%, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yaitu 9,57% pada tahun 2022.

Grafik 3
persentase penduduk miskin tahun 2018-2022 di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara



Source: Badan Pusat Statistik, 2023

Hal ini tentu saja menjadi kekhawatiran dimana investasi yang masuk secara masif namun sepertinya belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah tersebut terutama untuk pengentasan kemiskinan. Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri merupakan sumber terpenting bagi pembangunan daerah dan dapat mendorong pembangunan perekonomian daerah. Peningkatan investasi yang diikuti dengan teknologi baru akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan daerah. Dengan mereka, daerah dapat mengembangkan barang dan jasa yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, masuknya investasi dapat menurunkan jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Selain itu, investasi publik oleh pemerintah merupakan bagian dari belanja daerah yang juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan yang dianggarkan. Menurut Todaro dan Smith (2006). Investasi pemerintah mendorong perkembangan perekonomian daerah dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat lebih cepat. Investasi pemerintah termasuk belanja infrastruktur seperti gedung, irigasi, dan jalan

tentunya akan menunjang kegiatan perekonomian daerah, sehingga menarik investasi swasta ke daerah yang hasilnya tentunya akan menyerap pasokan tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran, dan pada akhirnya menurunkan angka kemiskinan.

METODE

Kami telah menetapkan model untuk menyelidiki hubungan antara pengeluaran pemerintah, Investasi swasta, dan kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data cross-sectional Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Dari penelitian sebelumnya dapat dibuat model sebagai berikut;

$$Pov = \alpha + \beta 1 Pma + \beta 2 Pmdn + \beta 3 Bm + e \dots \dots \dots (1)$$

Pov mewakili variabel Jumlah Penduduk yang dikategorikan miskin di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, kategori kemiskinan tersebut berdasarkan pengukuran Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan konsep Pov. kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (pendekatan kebutuhan dasar). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Oleh karena itu, penduduk dikategorikan miskin bila mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pma mewakili variabel realisasi jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara dari tahun 2013 hingga tahun 2022 dalam mata uang Dollar Amerika.

Pmdn mewakili variabel realisasi jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara tahun 2013 hingga tahun 2022 dalam ID Rupiah. Bm mewakili variabel realisasi jumlah total Investasi Pemerintah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,

dan Maluku Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 dalam ID Rupiah. kemudian seluruh data variabel diubah dalam bentuk log netral, maka modelnya menjadi seperti berikut:

$$LnPov_{it} = \alpha + Ln\beta 1 Pma_{it} + Ln\beta 2 Pmdn_{it} + Ln\beta 3 Bm_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (2)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dengan menggunakan chow test kita dapat memilih model panel terbaik antara common effect model dan fixed effect model, hasil dari Chow Test dapat dilihat dibawah ini:

Chow test $F(1, 3) = 41,92$ $Prob > \chi^2 = 0.0000$

Hasil uji chow menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, dimana H_0 merupakan common effect model dan H_1 merupakan fixed effect model. Baltagi (2015) mendefinisikan regresi efek tetap adalah teknik estimasi yang digunakan dalam pengaturan data panel yang memungkinkan seseorang mengontrol karakteristik individu yang tidak teramati yang bersifat invarian waktu dan dapat dikorelasikan dengan variabel independen yang diamati. Sehingga model Fixed Effect yang digunakan memperhitungkan efek cross-sectional.

4.1.1 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

4.1.1.1 Uji Heteroskedastis

Kami menggunakan uji Modified Wald untuk menguji heteroskedastisitas grup dalam model regresi efek tetap. Ini adalah versi modifikasi dari uji Wald yang mencari korelasi antara residu model regresi efek tetap. Ini dihitung sebagai rasio jumlah residu kuadrat berdasarkan hipotesis nol homoskedastisitas dengan jumlah residu kuadrat berdasarkan hipotesis alternatif heteroskedastisitas grup. Hasil uji Modified Wald dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1
Tes Wald yang Dimodifikasi untuk Heteroskedastik

H0: $\sigma^2(i) = \sigma^2$ for all i	
chi2 (4)	= 6.82
Prob>chi2	= 0.1457

Dari hasil The Modified Wald dapat disimpulkan bahwa nilai Prob. F lebih besar dari taraf signifikansi 5% maka H_0 diterima yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.1.2 Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel-variabel dalam model prediksi dengan perubahan waktu, digunakan uji Autokorelasi Wooldridge pada data panel yang merupakan uji autokorelasi orde pertama. Hipotesis nolnya adalah tidak ada autokorelasi orde pertama. Hasil uji Wooldridge dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

Uji Wooldridge untuk autokorelasi

Uji Wooldridge untuk autokorelasi pada data panel	
H0: tidak ada autokorelasi orde pertama	
F(1, 3) =	0.187
Prob > F =	0.6948

Berdasarkan hasil tersebut, kami menerima hipotesis nol tentang tidak adanya korelasi serial dengan tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, model tersebut mempunyai masalah korelasi serial.

4.1.1.3 Hasil Analisis Regresi

Hasil regresi data panel Fixed Effect dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 3

Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
C	5.869289	-2.28	0.000
PMA	-.0166543	-0.82	0.420

Berdasarkan hasil regresi panel di atas dapat dijelaskan bahwa masing-masing Variabel Independen berpengaruh secara parsial terhadap Kemiskinan. Variabel Realisasi Penanaman Modal Asing (Pma) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan. Selain itu Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan Kemiskinan, namun penurunannya sangat kecil. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Soebagiyo (2022) yang

menemukan bahwa Penanaman Modal Asing berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa, Dan Wati (2015) menemukan bahwa investasi swasta yang merupakan penjumlahan dari Foreign Direct dan Domestic Direct Investasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan.

Faktor yang menyebabkan Realisasi Penanaman Modal Asing dan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn) belum mampu berperan dalam pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara karena Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri lebih dominan di wilayah tersebut. sektor hilir yang merupakan investasi padat modal dan padat teknologi dibandingkan padat karya yang memerlukan tenaga ahli dan tenaga kerja berketerampilan tinggi yang tidak terdapat di daerah tersebut sehingga didatangkan dari luar daerah bahkan dari luar negeri sehingga menimbulkan tenaga kerja lokal. tidak untuk digunakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati (2015) menggunakan data panel dengan pendekatan Ordinary Least Square yang menganalisis pengaruh investasi publik, investasi swasta, IPM terhadap kemiskinan di Indonesia antara tahun 2009-2013 dengan menggunakan data cross sectional dari 33 provinsi di Indonesia, menemukan bahwa investasi publik secara signifikan mengurangi jumlah kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi investasi pemerintah untuk infrastruktur publik belum mencukupi,

Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 mengungkapkan bahwa infrastruktur pelayanan dasar publik di Maluku Utara belum memadai dan merata, mulai dari akses internet, daya saing daerah, ketersediaan jalan sebagai infrastruktur pendukung konektivitas, hingga pemanfaatan transportasi antar daerah.

PENUTUP

Tingginya angka kemiskinan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. terkait dengan dampak Permintaan Tenaga Kerja dari investasi non-inklusif. Artinya, dari investasi belum dirasakan oleh masyarakat lokal. Akibatnya, angka pengangguran di Provinsi penghasil nikel ini masih tinggi dan kemiskinan semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong investasi yang lebih inklusif, seperti komitmen investor untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal dan meningkatkan transfer pengetahuan dan teknologi antara pekerja terampil asing ke pekerja lokal.

Keterbatasan infrastruktur jelas mengakibatkan pemanfaatan potensi dan sumber daya ekonomi kurang optimal, bahkan sulit dikembangkan sesuai harapan. Kondisi seperti ini mengharuskan pemerintah mengalokasikan anggaran yang relatif besar untuk membangun dan menyediakan infrastruktur. Berdasarkan hasil analisis data, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendorong pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan layanan sanitasi dengan akses yang memadai dan berkeadilan untuk mengatasi kemiskinan. Pemerintah juga harus mengintensifkan investasi publik untuk pelatihan dan pendidikan publik. Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk bekerja sama menyiapkan tenaga kerja lokal dengan kualitas yang dibutuhkan oleh sektor industri di daerahnya masing-masing

REFERENSI

- Gomanee, K., Morrissey, O., Mosley, P., & Verschoor, A. (2005). Aid, government expenditure, and aggregate welfare. *World Development*, 33(3), 355-370.
- Gomanee, K., Girma, S., & Morrissey, O. (2005). Aid, public spending and human welfare: evidence from quantile regressions. *Journal of International Development: The Journal of the Development Studies Association*, 17(3), 299-309.

Mekahsari, I. (2012). Pengaruh Investasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.

Thwaites, Gregory. (2021). Investment and poverty reduction. CDC Investment Work.

Puspitasari, R., & Daryono Soebagiyo, M. (2022). Analisis Tingkat Kemiskinan Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Di Pulau Jawa Tahun 2016-2020 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Sutikno, R. Y., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S. Y. (2019). Pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01).

Waruwu, S. J. A. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Baltagi, Badi H. (2015). *The Oxford Handbook of Panel Data*. Oxford University Press.

Boediono. (1981). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.

Drukker, D. (2003) Testing for serial correlation in linear panel-data models, *The Stata Journal*, 3(2), pp. 168–177. Taken from: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1536867X0300300206>

Salim, H.S. dan Sutrisno, Budi. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Raja grafindo Perasada.

Salim, H.S. 2012. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Salvatore, Dominick; Krugman. (2006). yang diterjemahkan oleh Munadar Harris, *Ekonomi Internasional*. Edisi ke 5. Bandung: PT Gelora Aksara Pratama

Todaro, M.P., Smith, S.C. (2015). *Pembangunan Ekonomi*. 12th Edition. United Kingdom: Pearson Addison Wesley.

Wooldridge, J. M. (2002). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. Cambridge, MA: MIT Press.

<https://www.antaraneews.com/berita/2226510/kunjungi-maluku-utara-luhut-pastikan-pembangunan-infrastruktur-sofifi>

<https://www.bps.go.id/publication.html>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>